

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**SALINAN**

**KEPUTUSAN**  
**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**TIM PELAKSANA KONSOLIDASI PENGADAAN SEKTOR AIR MINUM**  
**PRODUK DALAM NEGERI SECARA NASIONAL**  
**UNTUK KATALOG ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2025**

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan konsolidasi pengadaan barang/jasa untuk katalog elektronik sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Konsolidasi Pengadaan Sektor Air Minum Produk Dalam Negeri Secara Nasional Untuk Katalog Elektronik Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : a. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

- b. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA KONSOLIDASI PENGADAAN SEKTOR AIR MINUM PRODUK DALAM NEGERI SECARA NASIONAL UNTUK KATALOG ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Konsolidasi Pengadaan Sektor Air Minum Produk Dalam Negeri Secara Nasional Untuk Katalog Elektronik Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan persiapan pemilihan pada pelaksanaan Konsolidasi Sektor Air Minum Produk Dalam Negeri;
- b. melaksanakan pemilihan penyedia Sektor Air Minum Produk Dalam Negeri dalam pelaksanaan konsolidasi;
- c. membantu penyiapan finalisasi kontrak payung antara Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Prinsipal Produsen dan/atau Pelaku Usaha Produk Dalam Negeri (PDN);
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan *e-purchasing* dari hasil konsolidasi Sektor Air Minum Produk Dalam Negeri secara nasional untuk katalog elektronik; dan

e. menyampaikan laporan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait yang dibutuhkan, serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan masa berakhirnya kontrak payung konsolidasi Sektor Air Minum Produk Dalam Negeri secara nasional untuk katalog elektronik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 November 2024

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN  
PENYELESAIAN SANGGAH

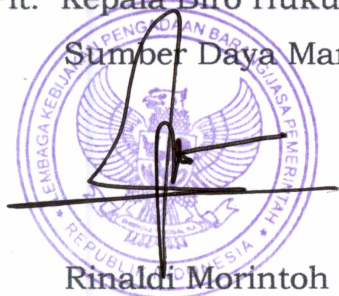
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA KONSOLIDASI PENGADAAN SEKTOR AIR MINUM SECARA NASIONAL UNTUK KATALOG ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : 5 TAHUN 2024

TANGGAL : 18 NOVEMBER 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KONSOLIDASI PENGADAAN SEKTOR AIR MINUM PRODUK DALAM NEGERI SECARA NASIONAL UNTUK KATALOG ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Unit Organisasi
1.	Pengarah	Setya Budi Arijanta	Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
2.	Ketua	M. Aris Supriyanto	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
3.	Anggota Tim Pokja Pemilihan	1. Eko Rinaldo Octavianus	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		2. Sari Melani	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		3. Dian Arsita Wardhani	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		4. Wuri Setianingrum	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		5. Andi Putri Fathania Nur Ranti Faisal	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		6. Andayani Nurfaiza	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Unit Organisasi
		7. Desak Putu Ayunda Putri	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		8. Diana Ulfi Jannati	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		9. Putri Ayu Permatasari	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		10. Diani Bahri Puteri	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		11. Putri Triyandini	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
		12. Tri Astutik	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
		13. Rahmi Fathani	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		14. Wirdaningsih Filiya Ciptaningrum	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN  
PENYELESAIAN SANGGAH  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA